

## **Nilai Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam Kearifan Lokal Masyarakat Ammatoa dan Masyarakat Baduy**

**Agussalim**

Madrasah Aliyah Negeri 2 Bulukumba, Sulawesi Selatan  
agustomaros@gmail.com

### Abstrak

Kearifan lokal Masyarakat Ammatoa dan Masyarakat Baduy mengandung nilai-nilai pendidikan karakter di antaranya kesederhanaan dan kejujuran. Nilai inilah yang harus dikembangkan sejak awal kepada peserta didik karena sesungguhnya secara fitrah mereka telah dianugerahi sifat sederhana dan jujur. Hanya saja lingkungan banyak merubah karakter asli mereka, sehingga diperlukan upaya yang disebut pendidikan karakter. Dan salah satu proses penting dalam pendidikan karakter adalah dengan mengeksplorasi kembali nilai-nilai kearifan lokal utamanya tentang kesederhanaan dan kejujuran.

*Kata Kunci: Pendidikan Karakter, Kearifan Lokal, Anti Korupsi, Ammatoa, Baduy*

### Abstract

The local wisdom Ammatoa Society and Baduy Society contains character education including simplicity and honesty. This value must be developed from the beginning for students because actually they are naturally given the nature of simple and honest. It's just that the environment changed their original character a lot, so it needed an effort called character education. And one of the important processes in character education is to re-explore the values of local wisdom primarily about simplicity and honesty.

*Keywords: Character Education, Local Wisdom, Anti-Corruption, Ammatoa, Baduy*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Kekayaan itulah yang menarik perhatian bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan melakukan perdagangan. Di antara mereka adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Sejak 1602 Belanda menjadi negara yang ingin memonopoli perdagangan melalui perserikatan dagang *Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC)*. Meskipun VOC sejatinya adalah perhimpunan dagang, namun ia mendapat hak istimewa dari pemerintah Belanda, baik secara politis maupun militer. Meski demikian pejabat-pejabat VOC tak sanggup menghindarkan VOC dari kebangkrutan hingga akhirnya dibubarkan pada 1799. Salah satu penyebab

perserikatan dagang ini dibubarkan adalah adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya.

Lamanya VOC-Belanda berkuasa di Indonesia (1602-1799), tidak terlepas dari adanya oknum-oknum pribumi yang bersedia bekerja sama. Tindakan ini merupakan salah satu sikap yang bertentangan dengan cinta tanah air. Setelah kemerdekaan, Belanda masih berusaha menanamkan pengaruhnya. Bangsa Indonesia pun berjuang mempertahankan kemerdekaan baik melalui meja perundingan maupun perjuangan bersenjata. Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia sejak tahun 1949 setelah menandatangani Konferensi Meja Bundar. Maka, sejak tahun 1949, pemerintahan di Indonesia mulai dikendalikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meski demikian, korupsi seperti yang terjadi pada masa VOC dan menyebabkan kebangkrutannya masih terus terjadi di negeri ini.

Korupsi benar-benar telah menjadi salah satu masalah besar dan menjadi masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Setidaknya kasus korupsi, baik yang masih tahap penyidikan maupun yang telah divonis bersalah menunjukkan kepada kita bahwa korupsi telah menjadi penyakit (*patologi*) dalam masyarakat, mulai di level daerah hingga pusat. Itulah yang terlihat dari *Transparansi Internasional* yang telah melakukan survey persepsi (anggapan tentang korupsi oleh rakyat) tahun 2001. Menurut survey persepsi tersebut, Indonesia menjadi negara terkorup kelima dari 13 negara yang paling korup.

Di tahun 2002, Presiden Megawati Sukarnoputri mulai memerangi korupsi dengan menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih merasa perlu untuk melengkapi perjuangan memberantas korupsi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah tahun 2012 – 2014. Menjelang tahun terakhir pemerintahannya, Susilo Bambang Yudhoyono masih sempat mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah masalah bersama dan harus dipikirkan bersama.

Di antara yang harus kita lakukan bersama adalah mempersiapkan generasi muda, yang merupakan pelanjut pembangunan bangsa. Mereka bukan hanya perlu dibekali ilmu pengetahuan, dan keterampilan, tetapi juga mental atau karakter. Hal ini telah dicanangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-undang Sisidiknas Pasal 3 dituliskan bahwa,

*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.*

Tentang penyelenggaraan pendidikan dituliskan juga dalam Undang-undang Sisidiknas Pasal 4 ayat 1 bahwa,

*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.*

Jadi menjunjung tinggi nilai kultural dalam proses pendidikan telah diamanahkan. Dengan demikian, nilai budaya atau kearifan lokal tidak boleh dilupakan dalam mempersiapkan generasi muda.

## **B. Penyebab Terjadinya Korupsi**

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dituliskan bahwa korupsi adalah perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri (seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok). Sedangkan koruptor diartikan sebagai orang yang melakukan korupsi; orang yang menyelewengkan (menggelapkan uang negara (perusahaan) tempat kerjanya (Indonesia, 2008). Komisi Pemberantasan Korupsi membagi tindak pidana korupsi menjadi tigapuluh bentuk/jenis yang pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi (Rinaldi, Purnomo, & Damayanti, 2007).

Donald Cressey pernah melakukan penelitian pada tahun 1950-an dan menyimpulkan bahwa setiap terjadinya suatu kecurangan dipengaruhi oleh tiga hal: (1) adanya tekanan/dorongan (*pressure/motivation*); (2) rasionalisasi/pembenaran (menyangkut etika dan akhlak dari yang bersangkutan); dan (3) adanya peluang/kesempatan (*opportunity*) dan pengetahuan (*knowledge*) untuk melakukan kejahatan (Sulistiyani, n.d.). Singh (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2%), hambatan struktur sosial (7,08%). Begitupula dengan Ainan (1982), menyebutkan salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi (Sulistiyani, n.d.; Yusuf, 2013).

Di Indonesia sendiri, penelitian terbesar tentang korupsi disebut *Local Government Corruption study (LGCS)* dilakukan oleh tim *Justice for the Poor Program, Social Development Unit* sebagai bagian dari Bank Dunia. Dalam laporan berjudul *Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi*, dijelaskan bahwa penyebab paling umum dari tindakan korupsi adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri (Rinaldi et al., 2007).

Wahyudi Kumorotomo menjelaskan karakteristik korupsi sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (*nonviolence*) dengan melakukan unsur-unsur tipu muslihat (*guile*), ketidakjujuran (*deceit*) dan menyembunyikan suatu kenyataan (*concealment*). Dengan kata lain karakteristik korupsi berhubungan dengan mentalitas manusia (Kumorotomo, 1992).

Dengan demikian, salah satu faktor utama penyebab korupsi adalah mental atau karakter manusia. Di sinilah letak pentingnya pendidikan karakter dikembangkan sejak awal terhadap peserta didik.

### **C. Pentingnya Kearifan Lokal Untuk Pendidikan Karakter**

Kearifan lokal (*local genius*) menurut I Ketut Gobyah adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal (Sartini, 2009).

Sementara itu Keraf (2002) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, maupun alam gaib (Putra, Ratya, & Suhartini, 2015).

Dengan demikian kearifan lokal secara substansial merupakan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari sehingga perlu dilestarikan dengan cara diajarkan kepada generasi muda akan sangat mempengaruhi karakternya.

### **D. Nilai Pendidikan Karakter Anti Korupsi dalam Kearifan Lokal *Pasang tallasa' kamase-masea Masyarakat Ammatoa***

Contoh kearifan lokal yang pertama akan dikemukakan adalah *Pasang Tallasa' Kamase-masea* (Pesan Hidup Sederhana) dari kawasan adat Ammatoa, Bulukumba Sulawesi Selatan. Tujuan utama hidup ber-*kamase-masea* adalah untuk *kalumanyyang kalupepeang ri allo anjorenganna Tu Rie' A'ra'na*, yaitu kehidupan yang serba berkecukupan di alam ghaib (surga). Mengapa? *Saba' inni linoa pammari-marianji* (karena dunia hanya perhentian sementara) (Akib, 2008). Berikut ini beberapa isi dari *pasang Tallasa' Kamase-masea*:

- A. *Anre' kalumanyyang kalupepeang* (tidak ada kekayaan yang abadi)
- B. *Rie' kamase-masea* (yang abadi hanya kesederhanaan).
- C. *Kanrena rie'* (makanan secukupnya).
- D. *Care-carena rie'* (pakaian secukupnya).
- E. *Pammalli juku'na rie'* (pembeli ikan secukupnya).
- F. *Kokonna rie'* (kebun secukupnya).
- G. *Balla situju-tuju* (rumah seadanya).
- H. *Ako' a'ra' niareki a'ra' la'balanja labbi ri pangnguppannu* (jangan mau dikata ingin berbelanja melebihi pendapatan).
- I. *Katutui rie'nu riantenganna tambattu palaraya* (jagalah apa yang ada padamu sebelum paceklik tiba). *Pasang* ini semua menunjukkan bahwa mereka tidak berlebih-lebihan atau tidak konsumtif.
- J. *Napa'jari inni linoa lollong bonena lanipakkigunai risikonjo tummantangnga ri bahonna linoa. Mingka u'rangi to'I larroi linoa rikau talarie' nalapangngurangia.*

(dijadikan bumi beserta isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tetapi ingat juga, apabila dunia marah kepada engkau tidak ada yang dapat mencegahnya).

### **E. Dasa Sila Masyarakat Baduy**

Contoh lain kearifan lokal yang memiliki persamaan dengan *Pasang Tallasa' Kamase-masea* yang di antaranya mengajarkan hidup sederhana adalah pedoman hidup orang Baduy yang dikenal dengan *Dasa Sila* (Akib, 2008).

- A. *Moal megatkeun nyawa nu lian* (tidak membunuh orang lain).
- B. *Moal mibanda pangaboga nu lian* (tidak mengambil barang orang lain).
- C. *Moal linyok moal bohong* (tidak ingkar dan tidak berbohong).
- D. *Moal mirucaan kana inuman nu matak mabok* (tidak melibatkan diri pada minuman yang memabukkan).
- E. *Moal midua ati ka nu sejen* (tidak menduakan hati pada yang lain/poligami).
- F. *Moal barang dahar dina waktu nu kakungkung ku peting* (tidak makan pada tengah malam).
- G. *Moal make kekembengan jeung seuseungitan* (tidak memakai bunga-bunga dan wangi-wangian).
- H. *Moal ngageunah-geunah geusan sare* (tidak melelapkan diri dalam tidur).
- I. *Moal nyokakeun atu ku igel, gamelan, kawih, atawa tembang* (tidak menyenangkan hati dengan tarian, musik atau nyanyian).
- J. *Moal made emas atawa salaka* (tidak memakai emas atau permata).

Dari kesepuluh prinsip hidup masyarakat Baduy di atas, kita dapat mengetahui sendiri bahwa ada beberapa pesan yang mengandung nilai kesederhanaan dan kejujuran, yaitu: *moal mibanda pangaboga nu lian* (tidak mengambil barang orang lain), *moal linyok moal bohong* (tidak ingkar dan tidak berbohong), *moal midua ati ka nu sejen* (tidak menduakan hati pada yang lain/poligami), *moal barang dahar dina waktu nu kakungkung ku peting* (tidak makan pada tengah malam), *moal make kekembengan jeung seuseungitan* (tidak memakai bunga-bunga dan wangi-wangian), *moal nyokakeun atu ku igel, gamelan, kawih, atawa tembang* (tidak menyenangkan hati dengan tarian, musik atau nyanyian), dan *moal made emas atawa salaka* (tidak memakai emas atau permata).

### **F. KESIMPULAN**

Contoh kearifan lokal yang dikemukakan di atas (*Pasang Tallasa' Kamase-masea* Masyarakat Ammatoa dan *Dasa Sila* Masyarakat Baduy) mengandung nilai-nilai luhur di antaranya kesederhanaan dan kejujuran. Nilai inilah yang harus dikembangkan sejak awal kepada peserta didik sejak dini. Hal ini juga membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal masih relevan untuk diejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hingga saat ini.

Di akhir tulisan ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah: *Pertama*, penyebab utama terjadinya korupsi adalah mental atau karakter manusia yang bertentangan dengan nilai-nilai kesederhanaan dan kejujuran. *Kedua*, salah satu upaya penting untuk menumbuhkan karakter anti korupsi adalah kearifan lokal karena mengandung nilai-nilai luhur terutama tentang

kesederhanaan dan kejujuran. *Ketiga*, terdapat kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia yang dapat diajarkan dalam pendidikan karakter, di antaranya adalah *Pasang Tallasa' Kamase-masea* Masyarakat Ammatoa dan *Dasa Sila* Masyarakat Baduy.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Y. (2008). *Ammatoa, komunitas berbaju hitam*. Pustaka Refleksi. Indonesia, K. B. B. (2008). *Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas*.
- Kumorotomo, W. (1992). *Etika administrasi negara*. Rajawali Pers.
- Putra, A. H., Ratya, A., & Suhartini, S. (2015). The Evaluation of Indonesia Import Policies of Garlic. *Greener Journal of Business and Management Studies*. <https://doi.org/10.15580/gjbms.2015.1.081414329>
- Rinaldi, T., Purnomo, M., & Damayanti, D. (2007). *Memerangi Korupsi Di Indonesia Yang Terdesentralisasi Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah. Justice for the Poor Project World Bank. Memerangi\_Korupsi\_dprd. Pdf*.
- Sartini, N. W. (2009). Menggali nilai kearifan lokal budaya Jawa lewat ungkapan (Bebasan, saloka, dan paribasa). *Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 5(1), 28–37.
- Sulistiyani, A. T. (n.d.). Korupsi Sebagai Perilaku Sosial dan Perilaku Formal yang Menyimpang. *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, 123.
- Yusuf, M. (2013). Korupsi dan Integritas Publik: Perspektif Nilai Budaya Bugis dan Al-Qur'an. *PILAR: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Kontemporer*, 2(2).